



PEREKONOMIAN

Wacanakan Pengelolaan Pasar di Bawah BUMD

JOGJA - Hilangnya Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional di Kota Jogja membuat Pemkot Jogja melakukan evaluasi. Salah satunya terkait alas hak tanah yang di atasnya terdapat pasar tradisional yang masih diakui pemkot. Dihapusnya Pasar Kembang sendiri dikarenakan alas hak tanah di selatan Stasiun Tugu Jogja itu merupakan Sultan Grond, yang pengelolannya diserahkan Keraton Jogja kepada PT KAI

▶ Baca Wacanakan... Hal 7

Perjelas Peruntukan Retribusi Pasar

■ WACANAKAN...
Sambungan dari hal 1

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) meminta status alas hak 30 pasar tradisional yang masih ada, dilihat kembali. "Kami akan pastikan lagi alas haknya, termasuk mengukur ulang luasan pasar yang ada sekarang," ujarnya kemarin (5/8).

Tidak hanya itu, untuk pengelolaan yang lebih profesional, HP mewacanakan pengelolaan pasar berada di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan pengelolaan berada di bawah BUMD sekaligus untuk memastikan retribusi pasar jelas peruntukannya. "Yang jelas pasar tradisional di Kota Jogja kita inginkan lebih nyaman bagi pengunjung maupun pedagang," ujarnya.

Terkait nasib eks para pedagang Pasar Kembang, HP mengatakan solusinya masih dibicarakan dengan PT KAI. Di antaranya dengan mengakomodasi pedagang setelah proses penataan kawasan Stasiun Tugu selesai.

Para pedagang eks Pasar Kembang juga diminta mendaftar ulang ke Disperindag Kota Jogja untuk diketahui jenis usahanya. "Masih ada 30 pasar di Kota Jogja. Bisa saja mereka ditempatkan di sana, tapi kami harus tahu dulu jenis usahanya," jelasnya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja Nasrul Khoiri juga meminta Pemkot Jogja tidak lepas tangan dengan nasib pedagang eks Pasar Kembang. Memfasilitasi pedagang ke pasar lain di Kota Jogja, juga salah satu solusi yang ditawarkan.

Selain itu Nasrul juga meminta status alas hak 30 pasar tradisional di Kota Jogja ditelusuri ulang. "Ini terkait nasib pedagang, jangan lagi dengan alasan (tanah) diminta yang punya, pedagang yang jadi korban," ujar politikus PKS ini. (pra/laz/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005